

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada

Asshiddiqie, Jimly, 2019, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan Dalam*

*Praktik*, Jakarta: PT RajaGrafindo persada

Bagir Manan dan Kuantan Magnar, 2017, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*,

Bandung: PT. Alumni Maruarar

Budiardjo, Miriam, 1992, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia

\_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press

\_\_\_\_\_, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas

Indonesia Press

Chand, Hari, 1994, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Service, Kuala

Lumpur

Dwiyanto, A. 2017, *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia*, Yayasan

Pustaka Obor Indonesia

Fahmi, Khairul, 2021, *Pembatasan Hak Pilih Warga Negara*, Depok: PT. Raja

Grafindo Persada

Ginsburg, Tom, 2003, *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Court in*

*Asian Case*, New York, Cambridge University Press

Kamil, Ahmad, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta, Kencana Prenada Media

Group.

Kelsen, Hans, 1961, *General Theory Of Law And State, Translated By Anders*



Wedberg, New York, Russel dan Russel

M. I. Helmi, 2019, *Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Pusat Studi Konstitusi Dan Legislasi Nasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty

Mocrad, Pontang, 2005, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung: Alumni

Mokhammad Najih dan Soimin, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press

Muhammad Syukri Albani, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Jakarta, Kencana

Mulyadi, Lilik, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Jakarta: Mandar Maju.

Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti

\_\_\_\_\_, 2014, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung

Rawls, John, 2006. "A Theory of Justice, London: Oxford University press", yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Rhiti, Hyronimus, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Santoso, Agus, 2014, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta

Schubert, G.A., 1998, *Judicial Behaviour: A Reader In Theory and Research*, Rand

Menally

Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo persada

\_\_\_\_\_, 2011. "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media

\_\_\_\_\_, 2005, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Majalah Hukum Indonesia,

\_\_\_\_\_, 2019, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Soeroso, 2011, *pengaturan Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika

Ujan, Andre, 2001, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta: Kansius

Wibowo, Mardian, 2019, "Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi konsep dan kajian dalam pembatasan kebebasan pembentuk undang-undang", Rajawali Pers, Jakarta

Wibowo, Mardian, 2019, *Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers

## **B. JURNAL**

Abdul Rahman Maulana Siregar, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945", *Jurnal*

*Hukum Responsif FH UNPAB*, Volume 5, Nomor 5

Abidin, Zainal, 2014, “Analisis Gaya Kepemimpinan: Prabowo Subianto dan Joko Widodo” *Jurnal Populis*, Volume 8, Nomor 2

Ajje, Radita, 2016, “”Batasan Kebijakan Pembentuk Undang-Unfang (*Open Legal Policy*) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2

Akbar Raga Nata, 2023, “Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mk Nomor 90/puu-xxi/2023” *Sanskara Hukum dan HAM*, Volume 2, Nomor 2

Alwino, Alfensius, “Diskursus Mengenai Keadilan Sosial : Kajian Teori Keadilan dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, dan Justice As Fairness Rawls,”

Aris, M. S, 2018, Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia, *Jurnal Yuridika*, Volume 33, Nomor 2

Azizzi, M. G. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kip Dalam Melaksanakan Pilkada Di Aceh (Studi Kajian Terhadap UUPA dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota). UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum

Effendi, A. (2017). Studi Komparatif Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 295–316.

Galang, Gardha, 2020, “*Open Legal Policy* Peraturan Perundang-Undangan Bidang



- Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi” *Jurnal Lex Renaissance*,  
Volume 5, Nomor 1
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta,  
Konstitusi Press (Konpress)
- Josef M Monteiro, 2007, “Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia”,  
*Jurnal Hkum Pro Justisia*, Volume 25, Nomor 2
- Kaputeni, S. J. 2021, “ Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen  
Politik (Studi Pada Partai Nasdem Halmahera Utara Dalam Pelaksanaan  
Pilkada 2020)”, *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, Volume 10, Nomor 2
- Koro, Abdi, 2012, “*Dissenting Opinion*” *Jurnal Varia Peradilan*, Nomor 323
- Lon L. Fuller, 1964, *The Morality of Law*, McGraw-Hill, Yale University Press
- M. Luthfi Chakim, 2015, “Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan  
Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” *Jurnal Konstitusi*, Volume 12,  
Nomor 2
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*  
(Edisi Revisi)
- Marzuki, Laica, “Judicial Review di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Legislasi*  
*Indonesia*, Vol. 1, No. 5, November 2004
- Metya Mutiara dan Sunny Ummul, 2022, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam  
Melkaskan *Judicial Review* Sesuai Fungsinya Dalam Mengawal Konstitusi”,  
*Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, Nomor 4
- Muhammad Addi Fauzani, 2019, “Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstisui Dalam  
Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*)”

*Jusititia ET PAX Jurnal Hukum,*

Nawas, Abu, 2021, “Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman”, *IBLAM Law Review*, Volume 1, Nomor 2

Pan Mohammad Faiz, 2009, “Teori Keadilan Jhon Rawls”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1

Perdana, Aditya, 2024 “Judisialisasi Politik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Batas Usia Cawapres dalam Pilpres 2024” *Jurnal Pengawasan Pemilu*

Rusdi, Muhammad, 2019, “Implikasi *dissenting opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 2, Nomor 1

Sa’adah, Nabita, 2019, “Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi dan Konstitusi Khususnya dalam Menjalankan Constitutional Review” *administrative law & Governance Journal*, Volume 2, Nomor 2

Satriawan, Iwan, 2019, “Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentuk Undang-Undang”, *jurnal konstitusi*, vol. 16, Nomor. 3

Sinamora, Janbatar, 2020, “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keberadaan Komisi Pembencanaan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen” *Jurnal of Legal Opinion*, Volume 01, Nomor 01

Sinarga, Barita, 2013, “Urgensi Perbedaan Pendapat (*dissenting opinion*) Hakim daalm Menjatukan Putusan” *Jurnal Varia Peradilan*, Nomor 331

Suherman, Andi, 2019, “Implementasi independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman”, *SIGN Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023, Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

### D. WEBSITE

Aisyah, “Hadir di Unisulla, Anwar Usman Singgung Batas Usia”

<https://unissula.ac.id/hadir-diunissula-ketua-mk-singgung-gugatan-usia->

capres-dan-cawapres/ pada tanggal 31 Mei 2024

Fahmi, Khairul, 2023, “MK dan Pertaruhan Legitimasi Pemilu 2024”, Universitas Andalas, <https://www.unand.ac.id/index.php/berita/opini/665-mk-unand-pakar.html>, diakses pada tanggal 23 Juni 2024

Humas MKRI, “MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi”,

[https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751&menu=2?utm\\_source=ditatompel.com#:~:text=JAKARTA%2C%20HUMAS%20MKRI%20%2D%20Majelis%20Kehormatan,Kesetaraan%2C%20Prinsip%20Independensi%2C%20dan%20Prinsip](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751&menu=2?utm_source=ditatompel.com#:~:text=JAKARTA%2C%20HUMAS%20MKRI%20%2D%20Majelis%20Kehormatan,Kesetaraan%2C%20Prinsip%20Independensi%2C%20dan%20Prinsip), di akses pada tanggal 24 Juni 2024

Sri Pujianti, 2023, “‘Berpengalaman Sebagai Gubernur’ Jadi Isu Konstitusional Syarat Capres-Cawapres,” MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, diakses pada tanggal 25 Juni 2024

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19753>

Hidayat, Dedi, 2023, “BRIN Nilai Putusan MK Berdampak Perubahan Peta Politik,”

Rri.Co.Id, diakses pada tanggal 25 Juni 2024, Pemilu edition, [https://www.rri.co.id/pemilu/402802/brin-nilaiputusan-mk-berdampak-perubahanpetapolitik?utm\\_source=news\\_main&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=general\\_campa\\_ign.4](https://www.rri.co.id/pemilu/402802/brin-nilaiputusan-mk-berdampak-perubahanpetapolitik?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=general_campa_ign.4)